ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO

Kisman Lantang¹

¹Program Studi Manajemen, Universitas Sintuwu Maroso

Email : *kisman@unsimar.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Poso dalam kurun waktu tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian melalui wawancara, sedangkan data sekunder yaitu data keuangan APBD Kabupaten Poso tahun anggaran 2011 sampai dengan 2015. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan beberapa rasio Keuangan Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDFF) Kabupaten Poso dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir rata-rata sebesar 4,14% atau sangat kurang. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Kabupaten Poso dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah rata-rata sebesar 4,40% atau berada pada skala Interval “sangat rendah”. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir rata-rata sebesar 99,76%. Ini berarti bahwa PAD Kabupaten Poso belum dapat dilaksanakan secara efektif karena masih berada dibawah 100%, walaupun pada tahun 2013 dan 2014 rasio realisasi PAD terhadap target PAD sudah dilaksanakan secara efektif karena berada di atas 100%. Sedangkan Belanja Daerah Kabupaten Poso dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir rata-rata sebesar 94, 75%. Ini berarti bahwa Belanja Daerah di Kabupaten Poso dinilai kurang efisien.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diatur untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak lagi mendapatkan dana perimbangan.

Halim (2011) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah sejak otonomi daerah diberlakukan, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten Poso antara lain:

- a) Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah,
- b) Rendahnya kemampuan daerah untuk mengali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relative kecil dibanding total penerimaan daerah,
- c) 'Kurang nya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada,
- d) Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Kabupaten Poso, karena itu Pemerintah Kabupaten Poso sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah Kabupaten Poso berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso adalah suatu ang pekerjaan/kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupten Poso jika dilihat dari Rasio Kemandirian?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Keuangan Daerah

Halim (2002) mengartikan “keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikia pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadika kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki /dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan undang-undang yang berlaku.

Menurut Halim (2009), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuanga daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah dalam umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut.

Sedangkan penertian keuangan daerah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut (Devas, dkk, 1999) adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab (*accountability*)
- b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan
- c. Kejujuran
- d. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*)
- e. Pengendalian

3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam mengalokasikan anggaran baik rutin maupun pembangunan senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip anggaran berimbang dan dinamis serta efisien dan efektif dalam meningkatkan produktifitas.
- b. Anggaran rutin diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintah dan pembangunan.
- c. Anggaran pembangunan diarahkan untuk meningkatkan sektor-sektor secara berkeimbangan dalam mendukung penyempurnaan maupun perbaikan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan skala prioritas (Nordriawan, Deddi. 2008).

Selain itu, perananan keuangan daerah yang makin meningkat akan mendorong terwujudnya otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab (Radianto dalam Farian, 2010). Mengenai pentingnya pengelolaan keuangan daerah, J. Wajong dalam Kaho (2010) menyatakan:

- a. Bahwa pengendalian keuangan mempunyai pengaruh yang begitu besar pada hari kemudian penduduk sederhana.
- b. Bahwa kemampuan mengendalikan daerah tidak akan memberikan hasil yang memuaskan dan abadi, tanpa cara pengendalian keuangan yang baik.
- c. Bahwa anggaran adalah alat utama pada pengendalian keuangan daerah, sehingga rencana anggaran yang diperhadapkan pada DPRD haruslah tepat dalam bentuk dan susunannya.

4. Sistem Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

a. Desentralisasi Fiskal

Menurut Saragih (2003) desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

b. Konsep Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah

Menurut Devas, dkk (1999) hubungan pusat dan daerah dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan:

1. Pendekatan kapitalis.
2. Pendekatan sumber pendapatan.
3. Pendekatan belanja.
4. Pendekatan komprehensif.

Menurut Halim (2007), perimbangan keuangan pusat antara pusat dan daerah yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintah dapat independen dibidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing.

Menurut Lubis (2009), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom maupun berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri.

5. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Abdul Halim, 2007). Dengan demikian setiap Pemerintah Daerah untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerahnya menggunakan beberapa Rasio Kinerja Keuangan Daerah yang antara lain: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Kekeragaman.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dimana akan diuraikan dan dianalisis permasalahan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pendalaman fakta melalui pendekatan kuantitatif yang merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. Sampel dalam penelitian ini adalah data keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015.

B. Teknik Analisis Data

Untuk mengukur kinerja keuangan daerah digunakan beberapa Rasio Kinerja Keuangan Daerah yang antara lain :

a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Untuk mengukur Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF):

$$DDF = \frac{PAD_t}{TPDt} \times 100\%$$

Dimana:

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PADt = Total PAD tahun t

TPDt = Total Penerimaan Daerah tahun t

Tabel 1
Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

%	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-12,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Wulandari (2001:22)

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio Kemandirian dapat diformulasikan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2
Skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	RKKD	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0,00%-25,00%	Instruktif
Rendah	25,01%-50,00%	Konsultatif
Sedang	50,01%-75,00%	Partisipatif
Tinggi	75,01%-100%	Delegatif

Sumber: Wulandari (2001)

c. Rasio Efektifitas PAD

Realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD)

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Target penerimaan PAD (berdasarkan potensi real daerah)}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektifitas menurut Mohammad Mahsun (2009), adalah:

- 1) Jika diperoleh kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif.
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 3
Skala Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Presentase Efisen	Kriteria Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisen
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Abdul Halim (2007)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Tabel 4
Target Total Penerimaan Daerah (TPD) Kabupaten Poso
Tahun 2011-2015 (dalam ribuan rupiah)

No	Total Penerimaan Daerah (TPD)	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	PAD	27.822.037	29.906.352	34.331.126	56.458.111	69.489.367
2	Pendapatan Transfer	525.139.449	604.628.648	687.408.020	753.914.916	904.011.966
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	140.856.980	89.136.634	116.351.192	162.669.913	192.009.373
	Jumlah	693.818.466	723.671.634	838.090.338	973.042.940	1.165.510.706

Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kab. Poso

Tabel 5
Realisasi Total Penerimaan Daerah (TPD) Kabupaten Poso
Tahun 2011-2015 (dalam ribuan rupiah)

No	Total Penerimaan Daerah (TPD)	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	PAD	25.654.922	26.226.376	34.643.597	66.734.660	69.329.684
2	Pendapatan Transfer	525.463.131	603.141.172	694.153.468	751.417.024	894.755.041
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	146.415.770	92.492.509	92.412.822	158.803.910	184.917.291
	Jumlah	697.415.770	721.860.057	821.029.887	976.955.594	1.149.002.016

Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kab. Poso

Tabel 6
Target Belanja Daerah Kabupaten Poso
Tahun 2011-2015 (dalam ribuan rupiah)

No	Target Belanja Daerah	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Belanja Tidak Langsung	404.296.283	456.017.607	517.445.535	556.318.590	669.450.076
2	Belanja Langsung	303.221.842	302.182.842	332.801.397	444.761.968	534.563.426
	Jumlah	707.518.125	758.200.449	850.246.932	1.001.080.557	1.204.013.502

Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kab. Poso

Tabel 7
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Poso
Tahun 2011-2015 (dalam ribuan rupiah)

No	Target Belanja Daerah	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Belanja Tidak Langsung	398.500.643	439.244.204	473.129.544	524.198.286	625.703.749
2	Belanja Langsung	271.029.498	279.744.992	323.397.840	429.374.803	493.246.143
	Jumlah	669.530.141	736.989.196	796.527.384	953.573.089	1.118.949.892

Sumber: LKPJ Kepala Daerah Kab. Poso

1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

$$DDF = \frac{FADt}{TPDt} \times 100\%$$

$$RDDF (2011) = \frac{25.654.992}{697.415.770} \times 100\% = 3,68\%$$

$$RDDF (2012) = \frac{26.226.376}{721.860.057} \times 100\% = 3,63\%$$

$$RDDF (2013) = \frac{34.643.597}{821.029.887} \times 100\% = 4,22\%$$

$$RDDF (2014) = \frac{66.734.660}{976.955.594} \times 100\% = 6,83\%$$

$$\text{RDDDF (2015)} = \frac{69.329.684}{1.149.002.016} \times 100\% = 6,03\%$$

2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{RKKD (2011)} = \frac{25.654.922}{525.463.131} \times 100\% = 4,88\%$$

$$\text{RKKD (2012)} = \frac{26.226.376}{603.141.172} \times 100\% = 4,35\%$$

$$\text{RKKD (2013)} = \frac{34.643.597}{694.153.468} \times 100\% = 4,99\%$$

$$\text{RKKD (2014)} = \frac{66.734.660}{751.417.024} \times 100\% = 8,88\%$$

$$\text{RKKD (2015)} = \frac{69.329.684}{894.755.041} \times 100\% = 7,75\%$$

3) Rasio Efektifitas PAD (t)

$$\text{Rasio Efektifitas PAD (2011)} = \frac{25.654.922}{27.822.037} \times 100\% = 92,21\%$$

$$\text{Rasio Efektifitas PAD (2012)} = \frac{26.226.376}{29.906.352} \times 100\% = 87,70\%$$

$$\text{Rasio Efektifitas PAD (2013)} = \frac{34.643.597}{34.331.126} \times 100\% = 100,91\%$$

$$\text{Rasio Efektifitas PAD (2014)} = \frac{66.734.660}{56.458.111} \times 100\% = 118,20\%$$

$$\text{Rasio Efektifitas PAD (2015)} = \frac{69.329.684}{69.489.367} \times 100\% = 99,77\%$$

4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (2011)} = \frac{669.530.141}{707.518.125} \times 100\% = 94,63\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (2012)} = \frac{736.989.196}{758.200.449} \times 100\% = 97,20\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (2013)} = \frac{796.527.384}{850.246.932} \times 100\% = 93,68\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (2014)} = \frac{953.573.089}{1.001.080.557} \times 100\% = 92,25\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (2012)} = \frac{1.118.949.892}{1.204.013.502} \times 100\% = 92,93\%$$

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan ini, maka dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDDF) Kabupaten Poso dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir rata-rata sebesar 4,88% atau berada pada Skala Interval “Sangat Kurang” yang berarti bahwa daerah tidak mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat.
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Kabupaten Poso dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir rata-rata sebesar 6,17% atau berada pada Skala Interval “Rendah Sekali” yang berarti bahwa daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah sehingga pola hubungan yang diterapkan adalah “Pola Hubungan Instruktif” dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.
3. Secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir rata-rata sebesar 99,76% ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Poso belum dilaksanakan secara efektif karena berada dibawah 100%, walaupun pada tahun 2013 dan 2014 rasio realisasi PAD terhadap target PAD sudah dilaksanakan secara efektif karena berada di atas 100%.
4. Belanja Daerah Kabupaten Poso dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir rata-rata sebesar 94,75%. Ini berarti bahwa Belanja Daerah di Kabupaten Poso dinilai kurang efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriana, Nur. 2014. Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan di Desa Sebuntal Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara, Skripsi, Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Bisma, I dewa Geda dan Hery Susanto. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007, Jurnal GaneC Swara .edisi khusus, Vol. 4 No. 3, Mataram.
- Bastian, Indra, 2006, Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005, 2005, Fokus Media, Bandung.
- Mahmudi, 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi 2, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahsun, Moh. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, ANDI, Yogyakarta.
- Muhibtari, Astriana. 2014. *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012*, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Oppier, Hermi. 2013. *Analisis Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara*, Jurnal Benchmark Vol. 2 No. 1, November 2013.
- Pramita, Puput Risky. 2015. *Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013*, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.